

PERAN PEMERINTAH NEGERI DALAM PROSES PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI BIDANG SDM, POLITIK, DAN EKONOMI (STUDI KASUS DI KECAMATAN SALAHUTU, KABUPATEN MALUKU TENGAH)

Ali Roho Talaohu¹, Nur Aini Nahumarury²

¹qalamqia@gmail.com

²nicken-nahoe@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze What is the Role of State Government in Coastal Community Empowerment Process in Human Resources , Politics, and Economics (Case Study In District Salahutu , Central Maluku). Based on these objectives , the target output (output) are expected from this study is the formulation of the concept regarding the role of the Government and the State Government in the District of Coastal Community Empowerment Salahutu .

The method used in this research is descriptive qualitative and uses techniques that are used in this study were equipped with the observations in-depth interviews conducted on the making of key informants and field notes about events that met the researchers in the field . Location of the study took place in Central Maluku District of Saluhutu , the research period of six months from the preparation of the study until the publication of research results in scientific journals.

Keywords : Role of State Government, Coastal Community Empowerment

PENDAHULUAN

Salah satu wilayah di propinsi Maluku yang menjadi daerah penting bagi pembangunan Maluku adalah Kabupaten Maluku Tengah yang memiliki 173 Negeri, terdiri dari 48 Negeri Swadaya, 56 Negeri Swakarya dan 69 Negeri Swasembada. Dan terdiri dari 14 kecamatan diantaranya adalah Kecamatan Salahutu terdiri dari 6 Negeri dan sangat berpotensi untuk melakukan proses pembangunan dengan mengikut sertakan masyarakat negeri yang mayoritas penduduknya masyarakat pesisir, (Maluku Tengah Dalam Angka: 2011).

Masyarakat pesisir oleh Kusnadi (2001:3) adalah komunitas yang sebagian besar penduduknya merupakan penduduk miskin, ditambahkan oleh Kusnadi (2002: 2) bahwa desa-desa pesisir adalah kantong-kantong kemiskinan struktural yang potensial. Kesulitan mengatasi masalah yang berkaitan dengan kemiskinan di desa-desa pesisir telah menjadikan penduduknya menanggung beban kehidupan yang tidak dapat dipastikan kapan akan berakhir. Padahal menurut Departemen Kelautan dan Perikanan RI (2000:1), seharusnya masyarakat pesisir merupakan masyarakat yang sejahtera karena potensi sumber daya alamnya yang besar, bukan merupakan bagian dari masyarakat yang tertinggal.

Oleh karena itu era reformasi, pemerintah secara serius mulai menangani pembangunan sektor kelautan dan perikanan termasuk didalamnya masyarakat pesisir dengan tekanan lebih besar pada paradigma pemberdayaan masyarakat. Melalui paradigma ini, berbagai program pengentasan kemiskinan pada masyarakat pesisir diorientasikan pada aspek penguatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat lokal.

Jumlah Negeri di Kabupaten Maluku Tengah kondisinya beragam, sehingga baik dari sisi sosial maupun ekonomi memerlukan penanganan yang khusus dan terintegrasi, sehingga pendekatan yang selama ini digunakan dengan memberikan bantuan dana atau program pembangunan tidak selalu menghasilkan dampak yang diharapkan pada masing-masing negeri.

Kondisi ini perlu segera diantisipasi agar tidak memunculkan permasalahan yang lebih rumit. Antisipasinya dilakukan antara lain melalui pengembangan kapasitas negeri, sehingga diharapkan negeri mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kemampuan ini diperlukan agar penduduk negeri dapat menjadi subjek yang menentukan arah pembangunan negerinya secara kreatif, mandiri, dan inovatif.

Dengan demikian, negeri tidak sekedar menjadi obyek proyek pembangunan yang cenderung tumpang tindih, salah sasaran, dan tidak partisipatif. Pembaharuan negeri mensyaratkan adanya penduduk dan aparat pemerintah negeri yang berdaya, dan pengembangan kapasitas menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat pesisir, serta mendorong pemerintah negeri semakin berdaya.

Sudah banyak program dilaksanakan di Negeri, bahkan Negeri cenderung *over-facilitated* oleh suprastruktur (pemerintah, pasar maupun LSM) tetapi tidak menyebabkan negeri menjadi lebih baik.

Karena itu, berdasarkan penjelasan diatas maka rumusan masalahnya Bagaimana Peran Pemerintah Negeri Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di bidang Sumber Daya Manusia, Politik, dan Ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk yaitu agar mampu menghasilkan konsep dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dan peran pemerintah negeri dalam bidang SDM, Politik dan Ekonomi.

Unsur desa sebagaimana dikemukakan oleh Sudirwo adalah: Wilayah tertentu, penduduk atau masyarakat dan pemerintahan desa (Sudirwo, 1991: 59). Dengan demikian dapat dipastikan bahwa satu saja unsur tersebut tidak ada maka sebuah wilayah belum dapat disebut sebagai “desa”. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang punya susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Ada pula yang mengartikan bahwa Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pewarisan dari undang-undang yang lama yang pernah ada yang mengatur desa (Widjaja, 2003:3). Dari definisi ini dapat terlihat bahwa ada hak-hak istimewa yang dimiliki oleh desa terutama yang berkaitan dengan hak asal-usul, sebab boleh jadi pada suatu wilayah (sebelum akhirnya disebut “desa”) terdapat satu keluarga atau komunitas tertentu yang berperan dan berjasa mengelola kawasan tersebut sehingga atas jasa-jasanya itulah maka kemudian keluarga atau komunitas tersebut mendapat hak-hak istimewa. Dalam implementasinya maka seringkali jabatan kepala desa diemban secara turun temurun sebagai bentuk dari “kearifan lokal” dalam menghargai jasa-jasa *founding father* desa tadi. Disebutkan pula bahwa istilah desa, disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan susunan asli tersebut bersifat istimewa. Bahkan otonom desa diakui secara nyata sehingga menjadi daerah istimewa (Widjaja, 2003:28).

secara garis besar pengertian pemberdayaan mengandung dua unsur: (1) *to give ability or enable to*, yakni upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program-program pembangunan agar kondisi kehidupan masyarakat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan; (2) *to give power or authority to*, yakni memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas kepada masyarakat agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan dalam rangka pembangunan diri dan lingkungannya secara mandiri.

Dalam konteks seperti itu, kemandirian diartikan sebagai: (1) kemandirian material, yaitu kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan materi dasar serta cadangan dan mekanisme untuk dapat bertahan pada waktu krisis; (2) kemandirian intelektual, yaitu pembentukan dasar pengetahuan otonom oleh masyarakat yang memungkinkan mereka menanggulangi bentuk-bentuk dominasi yang lebih halus yang muncul di luar kontrol pengetahuan; (3) kemandirian ketatalaksanaan, yaitu kemampuan otonom untuk membina diri dan menjalani serta mengelola kegiatan kolektif agar terjadi perubahan dalam situasi kehidupan

METODE PENELITIAN.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan menggunakan Teknik yang digunakan didalam penelitian ini yakni observasi yang dilengkapi dengan *in-depth interview* yang dilakukan terhadap *key informan* dan pembuatan catatan lapangan mengenai peristiwa-peristiwa yang ditemui peneliti dilapangan

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan melalui langkah-langkah: *pertama*, kategorisasi isu-isu yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas pemerintah negeri dan masyarakat pesisir yang diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam tidak terstruktur dari informan kunci, FGD, dan studi dokumentasi. *Kedua*, data dan informasi yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik

triangulasi. Analisis triangulasi adalah teknik menghubungkan data dan informasi yang diperoleh dari satu sumber informasi dengan sumber informasi yang lainnya, untuk memperoleh pemahaman interpretasi tentang masalah yang diteliti. *Ketiga*, hasil dari triangulasi tersebut kemudian dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Sumberdaya Manusia.

Kualitas sumberdaya manusia sangat berpengaruh pada sikap, pemikiran dan penampilan seseorang. Kualitas sumberdaya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang diraih, pengetahuan, dan keterampilan yang mereka miliki. Seseorang yang memiliki kapasitas kualitas sumberdaya yang baik dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, masalah masa depan dirinya dan masalah yang menyangkut orang lain atau pekerjaannya.

Dilihat dari tingkat pendidikannya, Raja pada empat negeri tersebut sebagaimana tabel yang tertera dibawah ini:

Tabel 1. menunjukkan bahwa dari empat negeri yang diteliti, unsur pimpinan negeri dan pimpinan kelembagaan negeri yang memiliki kualitas SDM yang sudah lebih merata adalah Negeri Liang dan Negeri Tulehu.

Kualitas pendidikan dari Aparat Negeri, tampaknya berpengaruh pada kapasitas individu dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Seperti dua negeri yang aparat negerinya rata-rata berpendidikan sarjana dan D3, lebih mampu menyelenggarakan Pemerintahan negeri dengan baik, salah satunya dapat dilihat dari kemampuan dalam menyusun produk-produk hukum seperti peraturan negeri, melakukan kerjasama dan lobi-lobi politik dengan pemerintah kabupaten bahkan partai politik. Tingkat pendidikan pimpinan kelembagaan negeri, Ketua Saniri negeri di empat negeri penelitian juga hampir sama dengan tingkat pendidikan Aparat Negeri. Kualitas pendidikan pimpinan dan anggota kelembagaan negeri dapat mencerminkan hubungan antar kelembagaan dalam penyelenggaraan negeri, sehingga tercipta *check and balances*.

Program pemberdayaan negeri diawali dengan pemberdayaan sumberdaya manusia, hal ini didasari asumsi bahwa kemandirian negeri akan dapat dicapai apabila manusianya memiliki kapasitas dan kemampuan serta keterampilan untuk melaksanakan tugasnya. Pada dasarnya kegiatan pemberdayaan sumberdaya manusia ini merupakan agenda Pemerintah Kabupaten (Program Kerja Tabaos Masuk Negeri ditambah dengan program pemerintah pusat melalui PNPM Mandiri dan program sektoral beberapa kementerian yang diaplikasikan di negeri).

Lembaga lain seperti LSM dan Perguruan Tinggi juga melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat negeri, namun sifatnya hanya bantuan sementara dalam bentuk pengabdian masyarakat dan tidak rutin seperti yang dilakukan oleh Pemerintah. Inisiatif pemberdayaan sebagian besar datang dari pihak luar negeri, bukan inisiatif dari masyarakat negeri.

Di Negeri Tulehu, Negeri Tial, Negeri Wai dan Negeri Liang. misalnya pemberdayaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program pemberdayaan Tabaos Masuk Negeri, serta Program Pemerintah pusat melalui PNPM Mandiri.

Pelaksana pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah tidak hanya dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Negeri sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas pemberdayaan masyarakat negeri, tetapi juga dilakukan oleh instansi Pemerintah terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Bappeda, dan lain-lain. Lembaga ini melakukan pemberdayaan langsung ke negeri dan seringkali tanpa melakukan koordinasi dengan BPM sebagai yang bertanggung jawab melakukan pemberdayaan negeri, akhirnya terjadi tumpang tindih program di masyarakat.

Dalam realisasinya, pendampingan yang sudah diprogramkan oleh Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat tidak dilakukan secara konsisten sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Pemerintah seharusnya melaksanakan pendampingan pada saat masyarakat dan

pemerintah negeri menyelenggarakan kegiatan, misalnya pada saat merumuskan perencanaan, seyogianya mereka didampingi oleh pendamping yang telah ditunjuk oleh pihak Pemerintah, namun dalam kenyataannya pendamping tersebut tidak setiap saat dibutuhkan datang ke negeri untuk melakukan pendampingan.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan Program Tabaos Masuk Negeri, ditunjuk pendamping yang berfungsi mendampingi masyarakat negeri mulai dari kegiatan merumuskan kebutuhan masyarakat, menyusun rencana, mengimplementasikan kegiatan yang telah disusun sampai dengan tahap melakukan evaluasi kegiatan. Namun disayangkan, menurut hasil wawancara di lapangan, pendamping tidak selalu berada di negeri, hal ini menyulitkan masyarakat desa pada saat memerlukan konsultasi dengan pendamping. Apabila masyarakat negeri membutuhkan konsultasi kepada pendamping, masyarakat negeri datang ke Kabupaten menemui pendamping atau petugas untuk melakukan konsultasi. Proses seperti ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten tidak mengalokasikan secara jelas dana untuk keperluan pendampingan.

Secara teknis langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melaksanakan kegiatan program, tetapi belum menyentuh pada peningkatan kapasitas individu dalam menumbuhkan kreativitasnya untuk merumuskan masalahnya sendiri dan bagaimana memenuhinya. Pelibatan masyarakat dalam program pemberdayaan Masyarakat negeri yang dibawa oleh masing-masing sektor (*top down*) lebih diarahkan pada bagaimana program tersebut dapat dikerjakan oleh masyarakat dan belum merupakan upaya menumbuhkan inisiatif, kreatifitas, dan partisipasi masyarakat.

Bentuk kegiatan pemberdayaan sumberdaya manusia masyarakat pesisir dan pemerintah negeriyang pernah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten di empat negeri di Kecamatan Salahutu.

Tabel 2 menunjukkan bentuk kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia yang pernah diberikan oleh Pemerintah (Provinsi, Kabupaten dan Negeri) berkaitan dengan tugas pokoknya. Selain diberikan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten yang berkait dengan tugas pokoknya, Pemberdayaan Sumberdaya Manusia juga diberikan Pemerintah melalui program-program pemberdayaan yang dibawa masuk ke negeri seperti PNPM Mandiri, Program Tabaos Masuk Negeri, dan berbagai program sektoral (Departemen/Kementerian dan lain-lain).

Sasaran utama kegiatan pemberdayaan sumberdaya manusia yang dilakukan Pemerintah adalah para Raja, dan pemimpin kelembagaan Negeri seperti Saniri Negeri, Soa dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri yang demokratis sesuai dengan tuntutan undang-undang.

Kegiatan pemberdayaan yang diberikan Pemerintah selain berkait dengan tugas dan fungsi negeri dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri, kebanyakan dikaitkan dengan program-program yang akan dilaksanakan di negeri. Misalnya kegiatan diklat/bintek BUMNEG karena negeri tersebut memperoleh aliran dana program Pembangunan yang didalamnya mensyaratkan di d negeri harus didirikan BUMNEG. Begitu pula dengan program PNPM Mandiri yang anggarannya berasal dari Pemerintah, juga melakukan pelatihan yang ditujukan kepada negeri-negeri melalui koordinasi Pemerintah Provinsi atau Kabupaten, dan negeri wajib mengirimkan wakilnya untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Dari data kegiatan pemberdayaan SDM tersebut terlihat bahwa tidak semua negeri mendapatkan fasilitas kegiatan program pemberdayaan, sehingga kualitas pemberdayaan di masing-masing negeri berbeda antara negeri satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu terjadi, karena penyelenggara yang ditunjuk oleh Pemerintah langsung melaksanakan kegiatannya di negeri tanpa sepengetahuan Pemerintah kabupaten, demikian juga yang berasal dari lembaga non Pemerintah dalam bentuk pengabdian masyarakat.

Pemberdayaan Politik Negeri.

Pemberdayaan politik negeri adalah proses bagaimana masyarakat dan perangkat desa memiliki kemampuan mengelola pemerintahan negeri yang demokratis dan mandiri, serta bagaimana masyarakat negeri memiliki akses dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri. Kemandirian politik di negeri dapat diukur dari bagaimana kelembagaan negeri dapat berfungsi secara demokratis dan

masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan arah pembangunan bagi masa depan negerinya.

Pada negeri, lembaga-lembaga asli negeri dikooptasi sedemikian rupa sehingga terjadi kemandekkan partisipasi masyarakat. Apa yang dilakukan lembaga-lembaga di negeri lebih membawa kepentingan negara dari pada kepentingan masyarakat negeri itu sendiri. Saluran yang seharusnya merupakan suara pembawa aspirasi negeri ke negara berubah menjadi saluran Pemerintah terhadap warga negeri. Masyarakat menginginkan bekerjanya mekanisme politik termasuk politik negeri yang lebih demokratis yang membuka peluang bagi partisipasi masyarakat secara luas. Pasca reformasi tuntutan masyarakat tersebut mendapat respons oleh Negara dengan menata ulang kehidupan politik dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan politik. Respon Negara ditandai dengan dirumuskannya regulasi dengan dikeluarkannya UU (No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan daerah, yang memberikan energi politik baru bagi kehidupan politik di negeri. Regulasi politik ini memberikan pijakan bagi negeri dalam menentukan pilihan-pilihan dalam penguatan kegiatan politik di negeri yang ditandai dengan kehadiran Badan Perwakilan Desa (BPD)/ Saniri Negeri.

Penyelenggara pemberdayaan politik bagi Masyarakat dan Pemerintah negeri dilakukan oleh Pemerintah ataupun Pemerintah negeri. Pemberdayaan politik yang diberikan oleh Pemerintah (Provinsi dan Kabupaten) dilakukan secara kolektif di Provinsi atau kabupaten, sedangkan yang dilakukan di negeri dilakukan oleh Pemerintah negeri atau bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Bentuk kegiatan pemberdayaan politik negeri yang dilakukan oleh Provinsi, Kabupaten dan negeri di empat negeri dapat dilihat pada tabel 3.

Pemberdayaan politik bagi masyarakat dan Pemerintah negeri, dilaksanakan oleh Pemerintah tanpa ada program secara khusus dengan nomenklatur pemberdayaan politik negeri. Muatan pemberdayaan politik negeri sebenarnya sudah digabung dalam pemberdayaan sumberdaya manusia, karena itu muatannya dapat dilihat dari materi yang diberikan. Kegiatan pemberdayaan politik negeri yang dilakukan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten diberikan melalui berbagai bentuk pelatihan seperti pelatihan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelatihan Mengenai Saniri Negeri, Pelatihan Legislasi, Sosialisasi Pemilukada, dan Sosialisasi Produk-produk Hukum Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri yakni Perda No. 1 Tahun 2006, Kabupaten Maluku Tengah.

Lebih lanjut Saniri Negeri dikonsepsikan sebagai badan perwakilan masyarakat negeri yang memiliki fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan negeri. Dengan demikian idealnya Saniri Negeri akan membawa perubahan dinamika politik negeri yang demokratis yang berbeda dengan dinamika politik sebelumnya yang bersifat sentralistik dan tanpa adanya *check and balance* dari masyarakat negeri. Pemberdayaan politik melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai Saniri Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat yang diikuti oleh Pemerintah negeri dan kelembagaan di negeri (Saniri, Kewang) dengan tujuan agar Pemerintahan Negeri dan pemimpin kelembagaan negeri, mengetahui tugas dan fungsi saniri negeri dalam penyelenggaraan Pemerintahan negeri yang demokratis.

Dilihat dari waktu penyelenggaraan yang dilakukan dinilai sangat singkat (satu sampai dua hari) yaitu antara satu sampai dengan tiga hari. Terbatasnya waktu ini dianggap belum cukup untuk membuat peserta mampu mengerti dan terampil dalam melaksanakan tugas dan fungsi Saniri negeri sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat negeri.

Pendidikan dan pelatihan legislasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan kabupaten melalui BPM yang melibatkan keempat negeri yang diteliti, bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat dalam menyusun peraturan negeri sebagai dasar hukum penyelenggaraan politik negeri yang demokratis. Pelatihan legislasi ini diikuti juga oleh perwakilan negeri dan kelembagaan negeri dari masing-masing negeri termasuk keempat negeri yang diteliti, dengan materi proses legislasi, bagaimana melibatkan masyarakat dalam proses legislasi, dan siapa yang dilibatkan dalam legislasi.

Pemberdayaan Ekonomi Negeri

Dalam konteks ekonomi negeri, bekerjanya sistem ekonomi menjadi perhatian utama agar terwujudnya *good governance*, karena tujuan utama dari *good governance* adalah terwujudnya keadilan sosial masyarakat negeri yang tercermin dari pengaturan sistem produksi dan distribusi atas barang dan jasa di masyarakat negeri. Dalam banyak kasus banyak kelompok bisnis kuat sering menentukan transaksi di pasar dan Pemerintah sering berpihak pada pengusaha, sehingga merugikan yang lemah. Konsep *good governance* di bidang ekonomi menghendaki sistem ekonomi harus dikelola oleh semua stakeholder yang berkepentingan dan Pemerintah sebagai salah satu *stakeholder* harus ikut mengelola sistem ekonomi agar pasar dapat berlangsung secara jujur dan membuka akses bagi pelaku ekonomi lemah. Hal ini didasari asumsi bahwa pasar sering dimanipulasi oleh banyak aktor misalnya Pengusaha, Buruh/Pekerja, Pemerintah atau Masyarakat yang berkepentingan mengatur melalui institusi yang ada yang seringkali merugikan masyarakat.

Atas dasar alasan tersebut pemberdayaan ekonomi negeri menjadi penting agar Pemerintah dapat memainkan peranan dalam menjamin akses kelompok yang lemah untuk memasuki pasar. Negara dapat memainkan peranan penting agar transaksi ekonomi dapat mengangkat kaum lemah melalui regulasi perundangan yang menjamin banyak orang bekerja melalui penggunaan teknologi padat karya atau investasi. Agar kelompok lemah dapat memasuki pasar, pihak yang lemah harus ditingkatkan posisi tawar mereka sehingga dapat mengontrol pasar.

Untuk meningkatkan posisi tawar pihak yang lemah, diperlukan Pemerintahan yang aspiratif dan berpihak pada kepentingan pihak yang lemah. Pandangan ini sesuai dengan misi *Good Governance* dalam perekonomian negeri yaitu, *pertama*, terwujudnya Pemerintahan negeri yang mengemban visi, misi kebijakan dan program pengembangan ekonomi kerakyatan. *Kedua*, terwujudnya partisipasi masyarakat ekonomi khususnya yang berada pada lapisan bawah terhadap jalannya Pemerintahan, sehingga memberikan kesempatan untuk mewujudkan perekonomian negeri yang mengembang aspirasinya. *Ketiga*, terwujudnya suatu institusi ekonomi yang memberikan akses kepada lapisan bawah untuk memasuki pasar. *Keempat*, hilangnya kelembagaan yang memperparah akses bagi masyarakat ekonomi khususnya lapisan bawah dalam mengembangkan ekonomi. *Kelima*, munculnya modal sosial masyarakat lapisan bawah, sehingga memunculkan posisi tawar yang kuat dalam berhadapan dengan kekuatan dari Negara dan pasar.

Pemerintahan negeri yang mempunyai visi, misi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan menjadi sarana untuk mencapai kemandirian ekonominegeri, karena belenggu kemiskinan di desa tidak hanya dapat diselesaikan dengan peningkatan produksi dan kesempatan kerja, melainkan melalui kepedulian Pemerintah negeri dan Masyarakat negeri dalam mengembangkan pemerintahan yang memfasilitasi kemajuan ekonomi dan peningkatan akses bagi masyarakat untuk mengontrol semua yang menentukan kesejahteraan mereka.

Melalui partisipasi masyarakat tersebut, masyarakat ekonomi akan dapat mengontrol jalannya Pemerintahan yang langsung berpihak pada kepentingan masyarakat dan membawa kemajuan ekonomi negeri. Partisipasi kelompok masyarakat ekonomi dalam pemerintahan negeri, diharapkan juga dapat mewujudkan kelembagaan ekonomi yang tidak hanya pro pasar, tetapi juga pro kepada pelaku usaha yang lemah. Dengan demikian masyarakat ekonomi ini akan bekerja secara kreatif untuk menghasilkan kelembagaan ekonomi negeri yang memperjuangkan kepentingan mereka.

Kemandirian ekonomi negeri juga membutuhkan modal sosial di kalangan masyarakat, karena dengan modal sosial, masyarakat dapat menggalang solidaritas yang dapat memperkuat jaringan sosial yang kuat dan dapat menjadi ajang belajar bersama dan untuk menghadapi pihak luar yang berpotensi memperlemah ekonomi mereka.

Keempat negeri yang diteliti memiliki kelembagaan ekonomi negeri sebagai wadah masyarakat negeri dalam mengatur perekonomian di negerinya. Kelembagaan ekonomi yang ada di negeri kebanyakan dalam bentuk usaha ekonomi yang dikelola oleh rumah tangga secara sendiri-sendiri, Kelompok Usaha Bersama dan Usaha Simpan Pinjam Dalam Bentuk Koperasi.

Kelompok usaha ekonomi yang dikelola rumah tangga secara mandiri adalah kegiatan usaha di sektor non-pertanian yang dipilih warga negeri utamanya petani dan nelayan sebagai

usaha untuk menambah pendapatan keluarganya. Jenis usaha rumah tangga di sektor non-pertanian ini misalnya bidang perdagangan, pertukangan, dan kerajinan. Potensi usaha mandiri yang dikelola rumah tangga, meskipun memiliki prospektif yang tinggi, warga masyarakat negeri menghadapi masalah berkaitan dengan ketrampilan usaha, teknologi pengolahan, pemasaran dan modal. Keempat masalah tersebut merupakan kendala yang dirasakan oleh warga di empat negeri.

Keberadaan kelembagaan ekonomi berupa kelompok usaha ditemui di empat negeri penelitian seperti kelompok usaha yang dibentuk oleh Dinas Sosial dengan program UEP (usaha ekonomi produktif) dan program-program yang diluncurkan oleh lembaga seperti PNPM Mandiri, Program Tabao Maju Negeri dan lain-lain. Perkembangan kelompok usaha bersama ini belum menampakkan hasil yang maksimal, karena budaya kerja kelompok dalam usaha ekonomi sebenarnya bukan ciri dari masyarakat negeri, budaya ekonomi masyarakat negeri adalah usaha yang dikelola oleh rumah tangga. Karena itu banyak ditemukan usaha kelompok ini hanya fiktif belaka, anggota kelompok dibentuk hanya untuk memenuhi syarat administrasi pencairan dana, sedangkan usahanya sendiri sebenarnya hanya dikerjakan oleh orang tertentu yang bertanggungjawab atas usaha ekonomi tersebut. Dengan demikian meskipun secara administrasi di negeri tercatat ada beberapa kelompok usaha ekonomi produktif, namun kemanfaatannya tidak dirasakan oleh sebagian besar masyarakat negeri.

Di empat negeri penelitian juga ditemukan organisasi ekonomi negeri berupa kelompok-kelompok petani seperti kelompok nelayan ikan tuna, kelompok peternak dan kelompok Ojek. Setiap negeri paling tidak memiliki satu kelompok nelayan ikan tuna, kelompok petani dan kelompok tukang ojek melalui kelompok petani ini petani dapat mengakses kredit usaha yang dikururkan Pemerintah dan dapat mengikuti penyuluhan pertanian dari PPL. Kegiatan kelompok petani biasanya berkaitan dengan penyuluhan pertanian, lewat penyuluhan dari PPL, petani belajar bagaimana bertani yang baik, memilih bibit unggul dan bagaimana memperoleh kredit usaha. Kelompok petani yang ditemui di empat negeri sebagian besar tidak kompak, pasif dan tergantung pada inisiatif Pemerintah. Partisipasi anggotanya tidak seluruhnya aktif, ini dimungkinkan karena sistem rekrutmen anggotanya asal catat saja. Organisasi ekonomi yang lainnya yang ditemukan sementara, perkumpulan tukang ojek, setiap desa ditemukan pangkalan-pangkalan ojek yang siap menjadi alat transportasi masyarakat negeri. Ojek merupakan peluang lapangan kerja non-pertanian yang berkembang di berbagai tempat di negeri-negeri. Organisasi tukang ojek ini dibentuk untuk menghindari konflik antar tukang ojek karena persaingan mencari penumpang. Organisasi tukang ojek ini tidak saja bermanfaat dalam melakukan distribusi pendapatan bagi tukang ojek, juga menjadi penopang ekonomi bagi masyarakat negeri. Keanggotaan perkumpulan tukang ojek ini lintas negeri, karena pangkalan ojek yang ada di negeri juga melayani untuk negeri yang lain, sehingga dipangkalan ojek negeri tersebut terdapat juga tukang ojek yang berasal dari negeri lain.

Di tiap negeri yang diteliti ditemukan kelembagaan ekonomi negeri berupa Koperasi. Di setiap negeri paling tidak terdapat satu Koperasi Unit Desa (KUD), satu Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi yang ditemui di empat negeri, semua kegiatannya masih didominasi dengan kegiatan simpan pinjam. Koperasi Unit Desa (KUD) yang seharusnya menfasitasi kebutuhan petani, mulai dari memberikan pinjaman modal kepada nelayan, menyiapkan sarana produksi nelayan dan pembelian produk nelayan, kenyataannya KUD baru sebatas melakukan kegiatan simpan pinjam. Kelembagaan ekonomi yang ada di empat negeri dapat dilihat pada tabel 4. berikut:

Di luar kelembagaan ekonomi yang ada di negeri, ada modal sosial (*sosial capital*) yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berupa nilai dan norma yang dipercayai dan dijalankan sebagian masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kualitas hidup mereka dan kelangsungan komunitas mereka. Modal sosial sebagai bentuk institusi sosial, yang merupakan suatu pola hubungan sosial yang hidup tanpa adanya organisasi sosial. Institusi sosial ini terbentuk karena adanya persamaan nasib, saling membutuhkan dan perasaan kebersamaan. Modal sosial berlangsung dalam konteks interaksi sosial yang berbentuk jaringan atau asosiasi informal seperti kelompok arisan. Kelompok arisan banyak ditemui di empat negeri, arisan merupakan asosiasi yang menyediakan fasilitas

menabung secara periodik dan menyediakan fasilitas kredit bagi anggota-anggotanya. Kelompok arisan ini muncul secara sukarela dan berkembang dengan memanfaatkan institusi mediasi seperti rukun tetangga/rukun warga (RT/RW), kekeluargaan (Soa/marga) dan institusi keagamaan (kelompok pengajian, dll). Dalam kelompok ini sedikit banyak akan membawa kepercayaan antar anggota dalam lingkungan masyarakat yang merupakan elemen pokok menuju masyarakat yang demokratis, karena didalamnya terdapat kontrol, pertukaran sosial, dan distribusi kekuasaan dari segi politik ataupun ekonomi yang dapat meminimalisir penguasaan sumber daya oleh satu atau beberapa aktor saja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut;

- 1) Negeri-negeri di Kecamatan Salahutu memerlukan optimalisasi penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat pesisir dan pemerintahan negeri melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dalam agenda pembangunan yang dijalankannya.
- 2) Keberhasilan peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan mendorong meningkatnya kapasitas politik masyarakat pesisir dan pemerintahan negeri dalam merumuskan visi dan misi masa depannya.
- 3) Keberhasilan peningkatan kapasitas politik masyarakat dan pemerintahan negeri akan mempermudah pengelolaan sumber ekonomi sehingga akan berimplikasi secara signifikan bagi kesejahteraan bersama.
- 4) Desain pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang sekarang harus direvitalisasi, terutama setelah lahirnya UU (No. 32 tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah yang memberi kesempatan yang luas kepada masyarakat desa untuk mengembangkan prakarsa dan kreativitasnya bagi upaya peningkatan kesejahteraannya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

- 1) Kajian tentang Ilmu Pemerintahan hendaknya lebih banyak menyoroti sistem pemerintahan desa/negeri sebab desa merupakan *front line* dalam sistem pemerintahan di Indonesia.
- 2) Strategi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa harus berkait dengan visi dan misi serta tujuan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah negeri.
- 3) Program pemberdayaan negeri harus dilakukan secara konsisten dan konsekuen dan berkesinambungan serta setiap saat ditingkatkan kualitasnya.
- 4) Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat pesisir di Kecamatan Salahutu harus berdasarkan kepada skala prioritas dan kemampuan setiap negeri masing-masing.
- 5) Agar pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan negeri tidak tumpang tindih dan bisa terintegrasi secara komprehensif, Pemerintah Negeri perlu membuat *Master Plan* Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.
- 6) Perlu juga dibuat Perda tentang Prosedur Musrenbang di tingkat Kabupaten yang esensinya menyangkut pemberdayaan SDM, politik, dan ekonomi di Negeri, sehingga sebelum acara Musrenbang setiap pihak sudah memiliki skala prioritas Program pemberdayaan SDM, politik, dan ekonomi di Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Anwar dan Setia Hadi.1996.*Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan*.Prisma, Jakarta.
- Atmosudirdjo, prajudi, 1979, *dasar-dasar Administrasi*, balai Aksara, Jakarta
- Bayu Suryaningrat, 1979, *desa dan kelurahan*, Rineka Cipta, Jakarta

- Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), 2000, Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Jakarta.
- Dirjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DKP, 2001, b. Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) dan Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Dirjen P3K, Jakarta
- Dirjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DKP, 2004, Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) 2004.
- Dedy Supriady Bratakusuma, Ph.D. Dadang Solihin, MA. 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Grenmedia Pustaka Utama, Jakarta
- Himawan pambudi, 2003. *Politik Pemberdayaan: Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- J. Babari, Onny S. Prijono, 1996, *Pendidikan sebagai sarana pemberdayaan*, Jakarta : Centre for Strategic and International Studies.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1996, Pembangunan untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Pustaka Cidesinde, Yogyakarta.
- Kartasasmita, J., 1996, Power and Empowerment: Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat. Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia, Gramedia, Jakarta.
- Kartasubrata, J., 1986, Partisipasi Rakyat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan di Jawa. Disertasi Program Pascasarjana, IPB, Bogor. (*tidak dipublikasikan*).
- Kusnadi, 2002, Konflik Sosial Nelayan, Kemisjkinan dan Perebutan Sumber Daya Perairan, LKIS, Yogyakarta.
- _____, 2005, Dalam Laporan Tahunan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku, Ambon.
- Kusumastanto, T., 1997, Metode Penelitian dan Analisis Data Sosial Ekonomi dalam Pengelolaan Ekosistem hutan Mangrove. Makalah Pelatihan Pengelolaan Hutan mangrove Lestari Angkatan 1-18 Agustus - 18 Oktober 1997, Bogor.
- _____, 1998, Penyusunan Konsep Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan yang Berakar pada masyarakat, Kerjasama Dirjen Bangda Depagri dengan PKSPL-IPB, Bogor.
- _____, 2002, Reposisi "Ocean Policy" dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia di Era Otonomi Daerah, Orasi Ilmiah, IPB, Bogor.
- Mubyarto, 1984, Strategi Pembangunan Pedesaan. Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- PKSPL dan LIPI, 1998, Strategi Dasar Pembangunan Kelautan di Indonesia Kerjasama Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB dan Proyek Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang Puslitbang Oseanologi.
- PPLH, 1995, Panduan Studi AMDAL di Wilayah Pesisir dan Lautan, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup. Lembaga Penelitian-IPB, IPB, Bogor.
- Prasojo, W. Nuraini, 1993, Pola Kerja Rumah Tangga Miskin pada Musim Panceklik (Studi Perbandingan pada Komunitas nelayan dan Pertanian Tanaman Pangan di Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, Jawa Barat), Tesis, IPB, Bogor.
- Remi Sutyastie Soemitro dan Prijono Tjiptoherijanto, 2002, Poverty dan Inequality in Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sarundajang, 2002. *Arus balik Kekuasaan Pusat ke daerah*, PT. Pustaka Sinar Harapan Jakarta
- Soeryani, M., 1987, Lingkungan Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan, (Editor) Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sya'roni, Roni S., Membangun Keberdayaan Komunitas Pantai Pengalaman Fasilitas Kelompok Masyarakat Pantai Prigi Jawa Timur. Dalam Jurnal Analisis Sosial, Vol. 7, No.2, Akatiga, Jakarta.
- Tjokrowinoto Muljarto, 2001, Pembangunan, Dilema dan Tantangannya, Cetakan Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wahab Solichin Andul, 2002, Masa Depan Otonomi Daerah, SIC, Surabaya.

Wayong, J., 1987, Administrasikeuangan Daerah, TP, Jakarta.

William N. Dunn, 2002, Pengantar Analisa Kebijakan Politik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Widjaja, HAW, Prof. Drs.2003, Pemerintahan Desa/marga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan.

Badan Pusat Statistik (BPS), 2011. *Salahutu Dalam Angka, Kabupaten Maluku Tengah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah.*

Perda No 1 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah.

Lampiran

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Aparat Negeri di Empat Negeri Penelitian

No.	Perangkat Negeri	Tingkat Pendidikan			
		Negeri Tulehu	Negeri Tial	Negeri Wai	Negeri Liang
1	Raja	S1	S 1	S1	S1
2	Sekretaris Negeri	S1	S 1	SMA	S1
3	Kaur Pemerintahan	D-3	SMA	SMP	SMA
4	Kaur Ekbang	D-3	SMA	SMP	SMA
6	Kaur Kesra	D-3	SMA	SMA	SMA
7	Kaur Umum	D-1	S-1	SMA	SMA
8	Kaur Keuangan	D-3	SMA	SMA	S1

Sumber: Hasil Penelitian, 2014.

Tabel 2. Kegiatan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia di empat Negeri di Kecamatan Salahuru Tahun 2014

Bentuk Kegiatan	Negeri Tulehu	Negeri Tial	Negeri Wai	Neger Liang
PROVINSI				
1. Bimbingan Teknis PNPM Mandiri	V	V	V	V
KABUPATEN				
1. Diklat Bumneg tingkat Kabupaten	V	-	-	-
2. Pelatihan Keuangan Negeri	-	-	-	-
3. Kegiatan peningkatan kualitas Pemerintahan				
4. Pelatihan dari Inspektorat pajak untuk Pemerintah Negeri dan Saniri	V	V	V	V
5. Bimtek (Program Tabaos Masuk Negeri)	-	-	-	-
6. Pelatihan Legislasi	V	V	V	V
7. Pengendalian Hama terpadu	V	V	V	V
	-	-	-	-
Negeri				
1. Pelatihan Perikanan, Pertanian & Peternakan	V	V	V	V
2. Pelatihan penggunaan Internet Masuk Negeri				
3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	V	V	V	-
4. Pelatihan Home Industri	V	V	V	V
	-	-	-	V
	-	-	-	-

Sumber: Hasil Penelitian, 2014

Catatan;

V = adalah tanda bahwa kegiatan pemberdayaan dilaksanakan di negeri.

- = adalah tanda bahwa kegiatan tidak dilaksanakan di negeri.

Tabel 3. Bentuk Kegiatan Pemberdayaan Politik di Empat Negeri di Kecamatan Salahutu

Bentuk Kegiatan	Negeri Tulehu	Negeri Tial	Negeri Wai	Negeri Liang
PROVINSI				
Pelatihan Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri	V	V	V	V
Pelatihan tentang pembentukan Saniri Negeri	V	V	V	V
KABUPATEN				
Pelatihan peningkatan kualitas Pemerintahan	V	V	V	V
Pelatihan Legislasi	V	V	V	V
Pelatihan mengenai pembentukan Saniri Negeri	V	V	V	V
Sosialisasi pemilukada	V	V	V	V
Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2006	V	V	V	V
NEGERI				
Pemilihan Raja	V	V	V	V
Pemilihan Saniri Negeri	V	V	V	V

Sumber: Hasil Penelitian, 2014

Tabel 4
Kelembagaan Ekonomi di Empat Negeri di Kecamatan Salahutu

Organisasi Ekonomi	Negeri Tulehu	Negeri Tial	Negeri Wai	Negeri Liang
KUD	V	V	V	V
Koperasi Non-KUD	V	V	V	V
Kelompok Tani Padi	V	V	V	V
Kelompok Nelayan Ikan Tuna	V	V	V	V
Kelompok Tukang Ojek	V	V	-	-
Arisan	V	V	V	V
Kelompok usaha bersama	V	V	V	V

Sumber; hasil penelitian, 2014